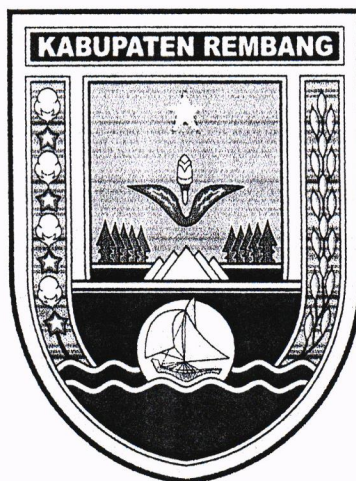


RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 28 JUNI 2018



TENTANG

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

Hari : KAMIS
Tanggal : 28 Juni 2018
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Laporan Komisi- Komisi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 32 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 13 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
 Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta staf.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 28 Juni 2018 kita dapat mengemban tugas melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pembahasan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Pada Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan perda serta APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 32 orang. Dengan demikian, kuorum rapat paripurna dalam rangka pembahasan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 12.30 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan yang berbahagia.

Pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan :

ayat (1) Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan.

ayat (2) huruf c

Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, DPRD mempunyai hak :

- a. Mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

- c. Meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- d. Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal tersebut, secara ringkas terlihat bahwa Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembahasan LHP BPK RI bertujuan untuk mendapatkan sikap jelas atau belum jelas terhadap materi hasil pemeriksaan BPK atau adanya permintaan pemeriksaan lanjutan atas temuan BPK.

Dengan diperolehnya sikap tersebut, DPRD Kabupaten Rembang dapat mengambil langkah apakah LHP BPK sudah dapat dipakai sebagai bahan pengawasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau DPRD perlu meminta penjelasan lebih lanjut kepada BPK.

Rapat Dewan yang terhormat.

Perlu kami sampaikan bahwa Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 telah diserahterimakan kepada DPRD Kabupaten Rembang, dengan surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor 127/S/XVIII.SMG/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 4 Juni 2018 telah ditetapkan untuk jadwal pembahasannya, yang mana pendalaman terhadap isi LHP BPK oleh Komi-komisi dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Juni 2018, dan untuk rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan komisi jatuh pada hari ini Kamis tanggal 28 Juni 2018.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Komisi-Komisi tentang Isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan;
3. Penutup.

Kita masuki acara kedua, dan merupakan acara pokok dalam rapat paripurna ini yaitu Laporan Komisi-Komisi tentang Isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan.

- Interupsi Sdr. Henry Purwoko, S.Pd.
“ Maaf Pimpinan tadi kita semua sudah sepakat dengan temen – temen kalau pembacaan laporan Komisi – Komisi hari dibacakan secara kolektif saja oleh Saudara Puji Santoso. Terima Kasih.”
- H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)
“ Oke saya kembalikan kepada anggota yang hadir pada hari ini, apakah setuju jika pembacaan laporan Komisi – Komisi hari dibacakan secara kolektif saja oleh Saudara Puji Santoso????”
- “ Semua anggota yang hadir menjawab setujuuu...!!!!!! “
- H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)
“ Kalau begitu saya persilahkan Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. untuk membacakan “

===== LAPORAN KOMISI-KOMISI ATAS LHP BPK-RI =====

Terima kasih kepada Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. yang telah mewakili.

Peserta rapat yang berbahagia.

Dari penyampaian masing-masing komisi, dapat disimpulkan bahwa LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 dapat dipahami dan dimengerti, dan tidak perlu lagi adanya penjelasan maupun adanya pemeriksaan lanjutan dari BPK. Namun untuk keabsahannya, perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah disetujui bahwa LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 tidak perlu penjelasan dan / atau pemeriksaan lanjutan dari BPK ??? “

===== Setujuuuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta rapat yang berbahagia.

Dengan telah disampaikannya laporan dari masing-masing komisi, dan diberikannya persetujuan oleh anggota terhadap LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Akhirnya dengan mengucap “Alhamdulillahirobbil ‘alamin “ tepat pukul 13.00 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat paripurna ini.

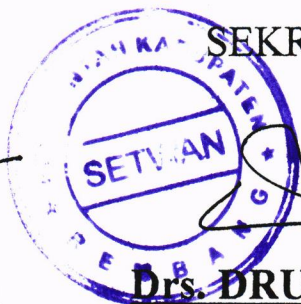
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



KETUA,

H. MAJID KAMIL MZ



SEKRETARIS,

Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN BPK RI KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Hasil Rapat Komisi- Komisi DPRD Tentang
Pendalaman Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Nomor ...⁷..... Tahun 2018
tentang Penetapan Pembahasan Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RI Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2017.

**RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI - KOMISI TENTANG LHP BPK RI KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017**

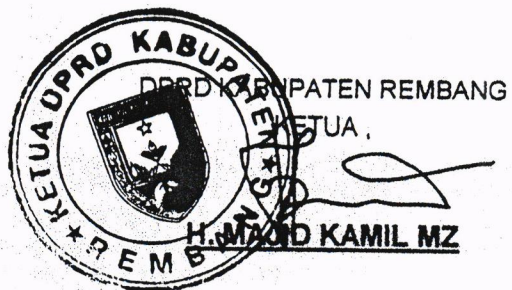
**HARI/TANGGAL : KAMIS, 28 JUNI 2018
PUKUL : 11.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



LAPORAN RAPAT
KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENDALAMAN TERHADAP LHP BPK RI TAHUN ANGGARAN 2017

A. Pelaksanaan :

- | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dasar | Rapat Badan Musyawarah tanggal 4 Juni 2018 tentang pembahasan pendalaman terhadap LHP BPK RI Tahun 2017. |
| 2. Hari/ Tanggal | Senin s/d Selasa, 25 dan 26 Juni 2016 |
| 3. Tempat | Ruang Komisi A DPRD Kabupaten Rembang |
| 4. Peserta Rapat | Pimpinan dan anggota Komisi A beserta OPD terkait |
| 5. Pimpinan Rapat | MUH ASNAWI, S.Pd.I |

B. Hasil Rapat :

Setelah mempelajari dan melakukan pendalaman terhadap LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Rembang Tahun 2017, oleh Komisi A dapat memahami dan dimengerti, sehingga tidak perlu lagi penjelasan/ atau pemeriksaan lanjutan oleh BPK RI.

Tetapi atas temuan dari beberapa OPD, Komisi A memberikan catatan agar Pemerintah Kabupaten Rembang menindaklanjuti LHP BPK RI sesuai dengan mekanisme yang ada.

C. Penutup :

Demikian Laporan hasil rapat Komisi A dalam membahas LHP BPK RI Tahun Anggaran 2017 selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD tentang LHP BPK RI Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna tanggal 28 Juni 2018.

KOMISI A
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



MUH. ASNAWI, S.Pd.I

Sekretaris,



MOH. ANSHORI

LAPORAN HASIL RAPAT KOMISI B DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMPELAJARI LHP BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TA 2017

A. PELAKSANAAN :

1. Dasar

Rapat Badan Musyawarah tanggal 4 Juni 2018 tentang penjadwalan pembahasan pendalaman terhadap LHP BPK RI Tahun 2017

2. Hari/Tgl : Senin s/d Selasa, 25 s/d 26 Juni 2018
3. Jam : 10 00 WIB
4. Tempat : Ruang Komisi B
5. Hadir dalam Rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi B
6. Pimpinan Rapat : Imro'atus Sholechah, S.E.M.M

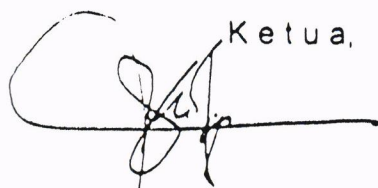
B. HASIL RAPAT :

Setelah mendalami dan mempelajari terhadap LHP BPK RI Kabupaten Rembang TA 2016 oleh Komisi B, pada dasarnya Komisi B DPRD Kab. Rembang sudah jelas dan dapat memahami terhadap LHP BPK RI Kabupaten Rembang TA 2017. Sehingga tidak perlu lagi ada penjelasan dari BPK RI.

C. PENUTUP :

Demikian laporan hasil rapat Komisi B DPRD Kabupaten Rembang dalam mendalami dan mempelajari LHP BPK RI Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017

Rembang, 28 Juni 2018
Komisi B DPRD Kabupaten Rembang

Ketua,


IMRO'ATUS SHOLECHAH, S.E.M.M

Sekretaris,

ALI IRCHAM, ST

LAPORAN RAPAT KOMISI D DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MEMPELAJARI LHP BPK RI TAHUN 2017

A. PELAKSANAAN

1. Hari : Senin s/d Selasa
2. Tanggal : 25 s/d 26 Juni 2018
3. Tempat : Ruang Komisi D
4. Hadir dalam rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi D
5. Pimpinan Rapat : Ketua Komisi D

B. HASIL RAPAT

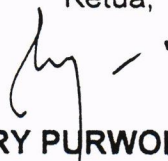
Setelah mendalami dan mempelajari LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, bahwa LHP BPK RI Tahun Anggaran 2017 sudah cukup jelas dan Komisi D DPRD Kabupaten Rembang dapat memahami dan menerima hasil LHP BPK RI Tahun Anggaran 2017. Adapun terkait dengan temuan dari BPK RI terhadap beberapa OPD dan sudah ditindaklanjuti oleh OPD akan tetapi Komisi D perlu memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - Terkait temuan BPK perihal pembangunan Lapangan Tenis dan Pembangunan Gedung Olahraga sejak awal komisi D sudah mengingatkan untuk berhati hati dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk itu kedepan agar OPD memilih konsultan perencana dan rekanan yang lebih baik dan profesional dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Dinas Kesehatan dan RSUD dr. R. Soetrasno
 - Terkait dengan temuan BPK terhadap kekurangan volume pekerjaan untuk itu kedepan agar konsultanpengawas lebih ketat dalam mengawasi dan memeriksa pekerjaan sehingga tidak terjadi lagi kekurangan volume pekerjaan.
 - Terkait dengan temuan BPK terhadap pengadaan obat di RSUD dr. Soetrasno yang ternyata hanya kesalahan atau ketidaksesuaian terhadap pencatatan administrasi pengadaan obat, untuk itu agar RSUD dr. R. Soetrasno memakai sistem manajemen obat supaya tidak terjadi kesalahan dalam administrasi pencatatan obat.

C. PENUTUP

Demikian laporan Komisi D DPRD Kabupaten Rembang dalam mendalami dan mempelajari LHP BPK RI Tahun Anggaran. 2017.

Rembang, 26 Juni 2018
Komisi D DPRD Kab. Rembang
Ketua,



HENRY PURWOKO, S.Pd

**LAPORAN HASIL RAPAT KOMISI B DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMPELAJARI LHP BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TA 2017**

A. PELAKSANAAN :

1. Dasar :
Rapat Badan Musyawarah tanggal 4 Juni 2018 tentang penjadwalan pembahasan pendalaman terhadap LHP BPK RI Tahun 2017.
2. Hari/Tgl : Senin s/d Selsa, 25 s/d 26 Juni 2018
3. Jam : 11.00 WIB
4. Tempat : Ruang Komisi B
5. Hadir dalam Rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi B
6. Pimpinan Rapat : Imro'atus Sholechah, S.E,M.M

B. HASIL RAPAT :

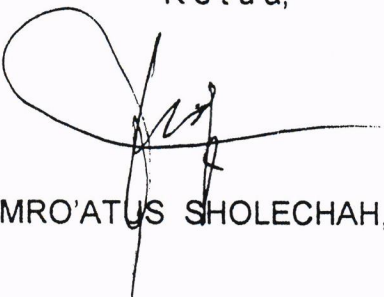
Setelah mendalami dan mempelajari terhadap LHP BPK RI Kabupaten Rembang TA 2017 oleh Komisi B, pada dasarnya Komisi B DPRD Kab. Rembang sudah jelas dan dapat memahami terhadap LHP BPK RI Kabupaten Rembang TA 2017. Sehingga tidak perlu lagi ada penjelasan dari BPK RI.

C. PENUTUP :

Demikian laporan hasil rapat Komisi B DPRD Kabupaten Rembang dalam mendalami dan mempelajari LHP BPK RI Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Rembang, 28 Juni 2018
Komisi B DPRD Kabupaten Rembang

Ketua,


IMRO'ATUS SHOLECHAH, S.E, M.M

Sekretaris,

ALI IRCHAM, S.T

D. DISPOSISI KETUA

--

DPRD KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMBAHASAN LHP BPK RI
TAHUN 2017

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah membahas hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2017 sebagai tindaklanjut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: Pembicaraan - pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 28 Juni 2018.

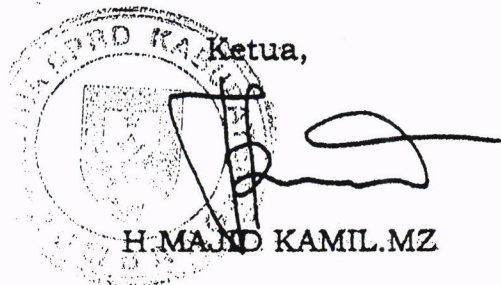
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Hasil Pembahasan LHP BPK RI Tahun 2017.
- KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang bersikap bahwa uraian LHP BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 cukup jelas dan tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal : 28 Juni 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. MAJID KAMIL.MZ